



**ANALISIS STRATEGI POLITIK CALON KEPALA DESA *INCUMBENT*  
DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI DESA BALONG TAHUN 2019**

**Dimas Ivan Anggara, Sulton, Ambiro Puji Asmaroini**

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[dimasiv9797@gmail.com](mailto:dimasiv9797@gmail.com)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan memahami strategi politik yang dilakukan calon kepala desa incumbent, (2) mengetahui dan memahami modalitas politik calon kepala desa incumbent dalam melaksanakan strategi politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif dan menemukan sebuah makna dari suatu persoalan atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi ke lapangan untuk melihat langsung aktivitas yang dilakukan oleh calon kepala desa incumbent dan tim suksesnya dalam persiapan menghadapi pilkades. Wawancara kepada calon kepala desa incumbent dan tim suksesnya dan dokumentasi penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan mereduksi data yang diperoleh ketika penelitian, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah strategi politik yang dilakukan oleh calon kepala desa incumbent dan tim suksesnya berupa strategi media massa dengan memanfaatkan handphone dan pamflet untuk kampanye. Strategi produksi pesan berupa penyampaian program-program kerja melalui kegiatan di masyarakat, dan strategi publik dengan mempengaruhi masyarakat yang menolak dan mempertahankan masyarakat yang mendukung. Modalitas politik yang dimiliki oleh calon kepala desa incumbent dan tim suksesnya ialah modal politik berupa dukungan dari tokoh dan kelompok masyarakat, modal sosial berupa kepercayaan dari tokoh dan kelompok masyarakat, dan juga modal ekonomi berupa uang untuk kampanye dan biaya akomodasi tim sukses.

**Kata Kunci:** Strategi politik, modalitas politik, kepala desa, incumbent, Pilkades

**How to Cite:** Dimas Ivan Anggara (2019). Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019. Penerbitan Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 3(2): 71-82

---

© 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. All rights reserved

ISSN 2614-1434 (Print)

ISSN 2614-4409 (Online)

## PENDAHULUAN

Berbicara perihal kedaulatan rakyat memang erat berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan yakni pelaksanaan demokrasi. Pada perkembangannya, muncul berbagai teori tentang kedaulatan rakyat ini yang merujuk kepada proses perubahan dalam

pemerintahan itu sendiri. Kedaulatan rakyat ini sangat penting bagi landasan atau pondasi utama untuk menelaah bagaimana proses perubahan dalam pemerintahan melalui kegiatan seperti pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat dimana lazimnya disebut demokrasi.

Barangkali sudah jelas bahwa demokrasi merupakan kekuasaan yang dipegang secara penuh oleh rakyat. Demokrasi juga dianggap salah satu bentuk pemerintahan suatu negara, beberapa negara di dunia menganut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan negaranya. Pemerintahan yang demokratis memerlukan nilai-nilai demokrasi untuk mengembangkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan nilai-nilai inilah kestabilan kondisi pemerintahan dapat ditegakkan. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain, kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang lain/kelompok lain, kerjasama, kesetaraan, persaingan dan kepercayaan.

Demokrasi mencakup banyak hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi yang menerapkan atau memungkinkan adanya kebebasan berpolitik secara setara dan bebas bagi rakyat. Artinya rakyat diperbolehkan untuk mengatur dan ikut andil dalam urusan pemerintahan di negaranya masing-masing. Dalam hal ini tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik dari pemerintah maupun dari orang lain. Karena pada praktiknya, proses demokrasi ini mengarah kepada pilihan hati nurani rakyat itu sendiri, rakyat bebas untuk memilih dan menentukan pilihannya. Seperti apa yang

dikemukakan oleh John L. Esposito bahwa “pada dasarnya kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karenanya semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah”. (Dikutip dari [blog.unnes.ac.id](http://blog.unnes.ac.id) melalui <http://blog.unnes.ac.id/hasanipol/2015/11/19/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Jum’at, 23 Agustus 2019).

Demokrasi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena sejak masa lampau nilai-nilai demokrasi sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi juga merupakan bentuk nyata penghormatan atau penerapan dalam kedaulatan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Ali Moertopo bahwa “Pemilu pada hakekatnya merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945”. (Dikutip dari [silontong.com](http://www.silontong.com) melalui <http://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/#> diakses pada hari Jum’at, 23 Agustus 2019). Dalam pemilihan umum, baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif, pilukada, sampai tingkat paling rendah yakni pemilihan kepala desa nilai-nilai

demokrasi wajib dijunjung setinggi-tingginya dan menjadi landasan pokok.

Salah satu asas pokok dalam demokrasi adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat ataupun pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan bupati hingga pemilihan kepala desa. Dalam perkembangannya, pemerintahan demokratis mempunyai suatu tatanan dan dipakai oleh hampir seluruh rakyat di dunia.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, proses pelaksanaan pemilu atau lazimnya disebut coblosan merupakan langkah atau cara yang digunakan untuk memilih wakil rakyat di lembaga pemerintahan yang telah ditentukan. Setiap beberapa periode yang telah ditentukan, suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan mengadakan pemilu untuk memilih dan menentukan pemimpin atau wakil rakyat. Hal ini juga bertujuan untuk menggantikan pemimpin atau wakil rakyat yang dahulu dan digantikan oleh yang baru. Pergantian kepemimpinan di pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat dan suatu organisasi sudah biasa terjadi. Hal ini bukan menjadi rahasia publik, karena setiap orang di negara ini barangkali

sudah tahu dan sudah paham akan fenomena dalam dunia politik tersebut.

Pemilu di Indonesia telah melahirkan berbagai macam karakteristik dan peninggalan-peninggalan yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pedoman bagi pemerintahan di masa mendatang tetapi juga pemerintahan terdahulu kadang menimbulkan persoalan yang hingga sekarang masih membekas. Karena dalam proses dan tata caranya biasanya menggunakan cara-cara yang tidak bersih yang dapat merusak asas pemilu yang "*luber jurdil*" yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lain halnya pemilu untuk menentukan siapa yang bakal berkuasa di pemerintahan lain pula pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia. Mulai dari pemilihan kepala daerah tingkat provinsi (gubernur), pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kotamadya (bupati/walikota) hingga pemilihan kepala daerah di tingkat desa atau lazim disebut Pilkades. Semua mempunyai tata cara dan aturan masing-masing. Bahkan strategi pemenangan calon yang akan maju dalam pemilu/pilkada dari tingkat pusat hingga daerah sangatlah berbeda.

Tahun 2019 bakal dinantikan bagi masyarakat Indonesia menentukan pemimpin dan wakil mereka yang baru di pemerintahan melalui

pemilihan umum atau pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan tanpa pengecualian juga di sebagian daerah di Indonesia juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah bahkan hingga pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam aturan dan konsepnya tentunya hampir sama dengan konsep dan aturan pemilu yang telah diatur dalam undang-undang. Beberapa hal yang membedakan antara pemilu dan pilkades ialah jangka waktu pemilihan dan penyelenggara. Jika pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali maka pilkades dilaksanakan setiap 6 tahun sekali.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa idealnya bertujuan untuk membantu masyarakat desa atau bisa juga digunakan sebagai wadah menyalurkan hak pilih dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Tetapi pada kenyataannya ajang pemilihan kepala desa biasanya digunakan sebagai ajang pembuktian siapa yang paling kuat antara calon kepala desa. Bahkan masyarakat sampai ada yang terpecah belah karena berbeda pilihan. Tentunya ini sangat tidak diharapkan tetapi masyarakat sudah terlanjur terpaku dalam pikirannya bahwa siapa yang paling kuat dukungannya maka dia yang akan memenangkan pilkades.

Fenomena strategi pemenangan pilkades juga menarik untuk dibahas. Dari realita dan fakta yang terjadi di masyarakat mengenai strategi pemenangan kepala desa dalam pilkades, tentunya setiap calon kepala desa akan menyiapkan berbagai strategi politik. Diantara beberapa strategi tersebut yang paling lazim terjadi di pilkades ialah kekerabatan dan politik uang. Terkhusus fenomena politik uang diharapkan mampu untuk membeli suara rakyat dan juga menarik simpati rakyat. Namun cara ini adalah cara yang tidak tepat dan cara yang tidak dibenarkan. Berangkat dari fenomena politik uang masyarakat harusnya sadar bahwa suara mereka harusnya tidak bisa dibeli segampang itu, karena hak mereka untuk memilih sesuai hati nurani telah terampas oleh politik uang. Apabila ini terus terjadi di masyarakat kita maka selamanya kita tidak akan pernah merasakan pemilu atau pilkades yang bersih dan jujur dan pada akhirnya dapat memudarkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya bisa dijunjung tinggi.

Strategi pemenangan ini digunakan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dan memenangkan dirinya dalam pilkades. Banyak cara yang dilakukan agar kemenangan dapat direalisasikan, selain dengan politik uang, masih ada cara-cara yang lain untuk memenangkan pilkades. Sebagaimana

masyarakat pada umumnya, calon kepala desa juga termasuk masyarakat umum, barangkali mereka juga sudah memahami akan seluk beluk tentang pilkades. Mereka tahu mereka harus bagaimana dan strategi apa supaya masyarakat ini dapat tertarik untuk memilihnya. Pada umumnya, yang paling penting dan harus dilakukan oleh setiap calon kepala desa yaitu penyampaian visi misi, apa yang akan dikerjakan dan diterapkan dalam pemerintahan desa apabila mereka terpilih nanti.

Selanjutnya bergantung bagaimana cara atau strategi calon kepala desa tadi bisa mendekati dan meraih hati masyarakat supaya mendapatkan simpati masyarakat. Pendekatan terhadap masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara juga diantaranya melalui kegiatan kemasyarakatan dan melalui kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap, artinya si calon kepala desa tidak harus terburu-buru untuk langsung menyatakan secara terang-terangan jika ingin mencari dukungan kepada masyarakat.

Dari fenomena pilkades yang terdahulu dapat dilihat bahwa siapa (calon kepala desa) yang bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat yang baik dan dapat menggunakan strategi berpolitik merekalah yang dapat

memenangkan pilkades. Bukan serta merta hanya mengandalkan uang dan banyak sokongan, tetapi berbaur dengan masyarakat itulah yang paling utama. Karena dikemudian hari ketika mereka sudah dilantik menjadi kepala desa, mereka akan hidup berdampingan dengan masyarakat.

Selain fenomena strategi pemenangan pilkades, ada satu hal lagi yang berkaitan dengan pilkades yang menarik untuk dibahas. Yakni fenomena *incumbent*. Fenomena ini muncul dalam pemilu untuk memenangkan seseorang yang masih menjabat dan mencalonkan kembali dalam pemilu. Selain karena ingin menguasai pemerintahan untuk yang kedua kalinya calon *incumbent* biasanya juga ingin mempertahankan popularitasnya di kalangan masyarakat.

Dalam pemilu atau pilkada, calon *incumbent* biasanya akan menang mudah atas lawannya karena calon *incumbent* dinilai sudah memiliki kinerja dan pengalaman dalam memimpin di periode sebelumnya bahkan calon *incumbent* juga dinilai mampu menggerakkan tokoh-tokoh informal maupun formal di daerahnya serta didukung oleh finansial yang lebih siap dibanding dengan lawannya. Calon *incumbent* juga dipandang mampu menjangkau semua segmen pemilih, berbeda dengan calon

yang baru yang tentunya agak kesulitan dalam mencari dukungan dari pemilih.

Berbicara tentang calon *incumbent*, Desa Balong tahun depan yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa juga memiliki calon kepala desa *incumbent* yang akan mencalonkan kembali dalam pilkades. Segala persiapan untuk pelaksanaan pilkades Desa Balong terus dipersiapkan panitia pemilihan kepala desa mulai dari pendaftaran calon kepala desa dan berlanjut ke tahap selanjutnya sampai nanti hari pelaksanaan pencoblosan.

Seperti yang sudah dibahas, pada pemilihan kepala desa tahun 2019, desa Balong memiliki 2 (dua) calon kepala desa yang akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1(satu) di desa Balong. Satu calon petahana atau *incumbent* yang akan maju lagi sedangkan yang menjadi lawan ialah 1(satu) calon baru yang akan ikut bersaing dalam pilkades. Dalam menghadapi pilkades tahun 2019 kedua calon pasti mempunyai strategi dan cara untuk memenangkan pilkades tersebut. Segala cara pasti akan dilakukan mengingat persaingan dengan lawannya diprediksi bakal sengit. Biasanya calon kepala desa ketika mendekati pilkades akan menggunakan berbagai upaya strategi bahkan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan suara atau menarik masyarakat agar dapat memilihnya. Tak

terkecuali bagi calon kepala desa *incumbent* yang akan maju mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa pastinya juga akan menggunakan strategi pemenangan pilkades untuk mempertahankan kekuasaannya.

Karena masalah ini menarik untuk dibahas, maka hal ini akan diteliti oleh penulis. Penulis tertarik ingin mengetahui apakah strategi politik yang diterapkan calon kepala desa *incumbent* dalam menghadapi pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Balong.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang mempunyai sifat deskriptif dan menemukan sebuah makna dari suatu persoalan atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian. Biasanya penelitian ini digunakan atau dipilih oleh peneliti yang akan meneliti permasalahan sosial dan budaya.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari narasumber atau informan dari tim sukses atau tim pemenangan (botoh) calon kepala desa *incumbent* dan juga observasi

lapangan yang dilakukan peneliti pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Balong. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi pelaksanaan penelitian, formulir pendaftaran calon kepala desa, data dan hasil rekap pemilihan kepala desa, foto dokumentasi kegiatan pilkades dan wawancara, data daftar jumlah pemilih tetap, profil desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wahyuni (2018) hal penting yang dapat mengendalikan strategi politik atau komunikasi politik seseorang adalah melalui pesan dan media, dimana keduanya harus mampu diterapkan dalam hal *public relations politic*. Peran media massa sebagai sarana berkampanye pada ajang pemilihan kepala desa Balong khususnya bagi calon kepala desa *incumbent* dan tim suksesnya ini sangat penting. Calon kepala desa *incumbent* melalui tim suksesnya mengungkapkan bahwa pada saat berkampanye mereka menggunakan media massa berupa *handphone* untuk

berkampanye. Penggunaanya sebagai media penyalur informasi dari calon kepala desa *incumbent* kepada tim suksesnya yang berada di setiap lingkungan satu desa. Lebih spesifiknya lagi bahwa media massa untuk umum pada ajang pilkades Balong tahun 2019 ini sebenarnya ada, akan tetapi pihak panitia membatasi penggunaan media massa tersebut dengan dalih supaya tidak terjadi kericuhan antar warga desa atau menghindari gesekan antar warga dan tentunya menghemat anggaran pilkades. Media massa sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengetahui siapa saja calon yang maju di pilkades Balong hanya berupa surat edaran dan pamflet yang dipasang di tempat strategis di tiap lingkungan desa Balong seperti di poskamling, di tiang listrik pinggir jalan dan lain-lain.

Selain penggunaan media massa sebagai sarana berkampanye, terkadang melalui media massa tadi muncul berbagai opini. Opini tersebut tentunya berupa isu-isu yang berkembang seputar calon kepala desa. Pihak calon kepala desa *incumbent* melalui tim suksesnya mengkonfirmasi bahwa opini yang tersebar ke masyarakat itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Opini yang menguntungkan itu dari pihak calon petahana itu sendiri, sedangkan opini yang merugikan itu

tersebar melalui mulut ke mulut tidak melalui media massa. Biasanya opini yang merugikan itu berasal dari pihak lawan politik yang ingin menjatuhkan pihak *incumbent* dan tim suksesnya.

Selanjutnya setelah muncul opini yang merugikan dari pihak lawan politik pihak calon kepala desa *incumbent* dan tim suksesnya mempunyai strategi dan cara untuk melawan opini tersebut dengan cara menjelaskan dan meluruskan kepada masyarakat mengenai opini yang beredar tadi supaya masyarakat tidak langsung percaya terhadap opini yang ada dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Masyarakat juga diajak untuk melihat fakta yang sebenarnya tentang petahana/*incumbent*. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat berpikiran negatif terhadap *incumbent* dan tim suksesnya.

Berangkat dari strategi politik tadi, maka pihak *incumbent* melalui tim suksesnya juga mempersiapkan konsep pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat pemilih. Tentunya melalui program-program dan visi misi yang akan dilakukan oleh cakades *incumbent* apabila nanti terpilih menjadi kepala desa. Selanjutnya isi pesan yang disampaikan berupa ajakan kepada masyarakat untuk mendukung dan memilih petahana di ajang pilkades nanti. Cara menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat juga beragam. Cara

yang paling ampuh yaitu tim sukses menyampaikannya melalui kegiatan yang ada di masyarakat seperti yasinan, arisan pemuda, gapoktan dan melalui kegiatan masyarakat yang lain. dengan memanfaatkan kegiatan masyarakat tadi tim sukses mudah untuk mengumpulkan massa yang banyak dan penyampaian pesan bisa diterima langsung oleh masyarakat.

Adanya calon *incumbent* di ajang pemilu maupun pilkades biasanya pasti mendapatkan penolakan dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Tidak lepas dari itu saja bahkan sampai muncul stigma atau pendapat negatif tentang petahana. Cara untuk mempengaruhi masyarakat yang menolak tadi yaitu dengan tidak langsung menolak pendapat yang dianggap negatif tadi, pihak petahana menerima pendapat tersebut dengan halus dan setelahnya meluruskan pendapat tadi dengan mengedukasi masyarakat agar tidak langsung percaya dan berpengaruh karenanya.

Apabila masyarakat sudah diedukasi agar tidak langsung percaya pada pendapat negatif tadi hal selanjutnya yang dilakukan ialah merangkul semua kalangan masyarakat. Tidak hanya merangkul masyarakat yang mendukung pihak *incumbent* saja tetapi juga masyarakat yang mendukung pihak lawan. Setelah itu tim sukses petahana juga berusaha untuk mempertahankan dan

meyakinkan masyarakat yang mendukung tadi dengan sering berkomunikasi secara intens agar masyarakat masyarakat tidak mengalihkan dukungannya kepada pihak lawan dan memastikan bahwa masyarakat tadi benar-benar berada di pihak petahana.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marijan (2010:184) modalitas politik yang harus dimiliki seseorang politisi atau pelaku yang terlibat untuk memenangkan dirinya dalam Pemilu atau Pilkada adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*sosial capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*). Modalitas politik yang dimiliki oleh calon kepala desa petahana untuk memenangkan di ajang pilkades Balong tahun 2019 sangat beragam. Artinya, calon kepala desa ini tidak hanya memiliki salah satu modalitas politik saja atau tidak mengandalkan satu modalitas politik saja. Modalitas politik yang pertama ialah modal politik, yaitu adanya dukungan dari masyarakat dan atau kekuatan politik lain. dalam hal ini calon kepala desa *incumbent* dalam menghadapi pilkades Balong memiliki kekuatan atau modal politik tersebut. Hal ini dikarenakan calon petahana ini memiliki banyak kenalan yang ada di masyarakat dan banyak orang atau masyarakat desa Balong yang sudah pasti

mengenal beliau. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang ada di desa Balong juga mendukung calon petahana ini seperti RT, RW, dan yai atau ulama setempat. Hal ini juga memperkuat asumsi bahwa calon *incumbent* ini ternyata masih layak untuk maju sebagai calon kepala desa kembali.

Adapaun cara calon petahana dan tim suksesnya untuk memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat ialah dengan sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Artinya calon petahana dan tim suksesnya sering melakukan sharing dengan masyarakat mengenai masalah apa yang perlu didiskusikan dan juga bagaimana nanti bisa untuk ditemukan solusinya.

Selain mendapatkan dukungan, calon *incumbent* dan juga tim suksesnya juga mendapatkan penolakan dari tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat karena banyak tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat yang kontra terhadap pihak *incumbent*. Penolakan tersebut berupa keinginan agar terjadi perubahan di desa Balong terutama masyarakat yang menginginkan memiliki kepala desa baru. Selanjutnya cara pihak *incumbent* dalam meminimalisir penolakan tersebut dengan cara merangkul masyarakat supaya tidak timbul kebencian terhadap masyarakat.

Adapun setelah mendapatkan dukungan dan penolakan dari tokoh dan kelompok masyarakat calon *incumbent* dan tim suksesnya tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan beranggapan bahwa masyarakat yang menolak tadi sudah terpengaruh oleh omongan pihak lawan politik. Beliau (calon kades *incumbent*) sadar bahwa pihaknya pasti menjadi sasaran kritik dan kritikan tersebut bersifat menjatuhkan bahkan sampai melebih-lebihkan. Namun sebagai pemerintah yang baik, cakades petahana menegaskan bahwa memang harus siap dikritik dan menganggapnya wajar.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Diantaranya adalah sering terjun langsung ke kegiatan masyarakat dan tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat. Tim sukses sebagai fasilitator dapat menampung aspirasi dari masyarakat untuk nantinya disampaikan kepada calon kepala desa *incumbent* untuk bisa dicarikan solusi serta dijadikan program yang bisa membangun masyarakat nantinya.

Pendekatan kepada masyarakat bisa dilakukan dengan sering bertatap muka dan sering mengikuti kegiatan di masyarakat seperti yasinan, arisan, dan sebagainya. Tim sukses juga memanfaatkan kegiatan masyarakat

tersebut untuk mengajak masyarakat supaya mendukung dan memilih calon *incumbent* ini. Apabila sudah dekat dengan masyarakat maka kita dapat menangkap respon dari masyarakat dan memperoleh dukungan dengan bentuk kemauan masyarakat untuk memilih calon kades *incumbent*.

Mengenai modalitas politik yang terakhir yaitu modal ekonomi, tim sukses cakades *incumbent* mengungkapkan bahwa ketika berkampanye sangat membutuhkan modal tersebut karena modal ekonomi menjadi kebutuhan utama dan bahkan sangat penting. Selanjutnya apabila tidak ada modal ekonomi ini maka proses kampanye juga akan terhambat. Untuk kisaran seberapa besar modal ekonomi yang dibutuhkan tim sukses dan calon *incumbent* dalam berkampanye di pilkades Balong tahun 2019, pihak tim sukses tidak berani untuk mengungkapkan nominalnya. Dikarenakan kebutuhan yang digunakan sangatlah banyak, kadang juga ada kebutuhan yang tidak terduga sehingga untuk berapa besar kebutuhan ekonomi yang digunakan ini pihak tim sukses cakades *incumbent* tidak bisa memperkirakan. Namun berdasarkan pengamatan peneliti di masyarakat pada saat menjelang Pilkades Balong masyarakat mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,00 per orang.

Selanjutnya selain digunakan untuk berkampanye, modal ekonomi ini juga digunakan untuk kebutuhan yang lainnya seperti pembentukan kader, biaya komposisi dan transportasi kader, dan juga uang lelah bagi para tim sukses. Selain itu juga ada dana khusus yang dialokasikan untuk dibagikan kepada masyarakat pemilih. Berkaitan dengan penggunaan modal ekonomi sebagai alat untuk berkampanye hal ini erat kaitannya dengan politik uang (*money politic*) yang terjadi di Indonesia. Pihak tim sukses cakades *incumbent* berpendapat bahwa politik uang di Indonesia ini sudah menjadi kesalahan umum yang dimana masyarakat dapat menilai sendiri. Setiap ada ajang seperti pemilu ataupun pilkada hampir semua calon yang maju di ajang tersebut pasti membagikan uang sebagai ganti masyarakat telah memilihnya atau bisa dikatakan sebagai suara yang telah dibeli. Namun apabila si calon tadi tidak membagikan uang, besar kemungkinan masyarakat juga tidak mau untuk memilihnya.

Dilihat dari strategi politik dan modalitas politik yang dimiliki oleh calon kepala desa *incumbent* dan non *incumbent* dan merujuk kepada hasil Pemilihan Kepala Desa Balong 2019 yang akhirnya dimenangkan oleh calon non *incumbent*, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya untuk praktik

pelaksanaan strategi politik calon kepala desa *incumbent* tidak ada yang salah ataupun keliru hanya saja kekalahan calon kepala desa *incumbent* terletak pada modal ekonomi. Berdasarkan observasi peneliti pada saat pelaksanaan di lapangan dan mendekati hari pelaksanaan Pilkades, calon kades non *incumbent* melakukan politik uang kepada sejumlah masyarakat, sehingga bisa dilihat hasilnya pada rekapitulasi penghitungan suara selisih 99 suara yang dimenangkan oleh calon kepala desa non *incumbent*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa strategi politik yang diterapkan oleh calon kepala desa petahana dan tim suksesnya ialah strategi media massa yaitu pemanfaatan media massa berupa *handphone* dan juga pamflet sebagai alat atau sarana berkampanye dan juga pandai-pandai dalam menghadapi opini yang diciptakan oleh media dan lawan politik. Perencanaan atau konsep pesan dan penyampaian pesan kepada masyarakat pemilih dilakukan oleh cakades *incumbent* dan tim suksesnya dengan menyampaikan program-program yang akan dilakukan serta pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan masyarakat. Pendekatan publik terhadap

masyarakat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada masyarakat pemilih dengan cara mempengaruhi masyarakat yang menolak pencalonannya serta mempertahankan masyarakat yang mendukungnya.

Modalitas politik yang digunakan calon kepala desa incumbent dan tim suksesnya ialah modal politik, modal sosial, dan juga modal ekonomi. Berbekal jabatan kepala desa sebelumnya selama dua periode cukup bagi calon kades petahana ini untuk memiliki modal politik yang baik karena masyarakat satu desa pasti mengenal beliau dengan baik. Buktinya dengan adanya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga dari kelompok-kelompok masyarakat seperti RT, RW, kyai dan ulama setempat. Modal sosial yang dimiliki oleh calon kepala desa *incumbent* ini tidak lepas dari hubungan baik dengan masyarakat sehingga karena alasan tersebut maka banyak dari tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang percaya kepada beliau. Modal ekonomi yang berbicara banyak disini. Kekuatan *incumbent* bisa dilihat dari modal ekonomi yang beliau miliki bahkan tidak sedikit yang dikeluarkan untuk biaya kampanye dan juga biaya akomodasi bagi para tim suksesnya. Karena dalam praktiknya modal ekonomi ini memang sangat dibutuhkan untuk berkampanye

dan juga sebagai biaya akomodasi tim sukses.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Muhammad Hasan. 19 November 2015. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli diakses melalui <http://blog.unnes.ac.id/hasanipol/2015/11/19/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli/>
- Chaca, Tata. 7 Juli 2018. 9 Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli dan Secara Umum serta UU diakses melalui <http://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/#>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pembukaan UUD 1945
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, D. E. (2018). Komunikasi Politik Calon Walikota Petahana Dr. H. Firdaus, ST, MT Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Walikota Pekanbaru 2017-2022. *JOM FISIP*, 1-15.